BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pemberian Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Perguruan Tinggi Negeri dalam Perspektif Perundang-Undangan Pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penggunaan Barang Milik Negara, yang mencakup kendaraan dinas. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai prosedur penggunaan kendaraan dinas dan menetapkan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas atau tugas resmi. Namun, meskipun terdapat ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan, implementasinya di lapangan masih menemui kendala.

Berdasarkan peraturan yang ada, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas meliputi sanksi administratif hingga tindakan disipliner sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, di Perguruan Tinggi Negeri, kasus-kasus penyalahgunaan kendaraan dinas masih sering terjadi.

2. Kekuatan hukum dari sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di PTN, dapat dilihat dari sejauh mana peraturan yang ada dapat ditegakkan dan

menghasilkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 10 Tahun 2020 sudah mengatur secara rinci tentang penggunaan kendaraan dinas dan memberi kewenangan untuk memberikan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Pengaturan Pemberian Sanksi beberapa langkah dapat diambil, yaitu:
 - a. Penyempurnaan Peraturan Rektor: Peraturan Rektor Universitas Jambi perlu disempurnakan untuk memberikan ketegasan mengenai jenis sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran penggunaan kendaraan dinas. Penambahan pasal yang mengatur sanksi administratif hingga sanksi pidana terhadap pelanggar perlu dicantumkan dengan jelas. Misalnya, sanksi yang bisa diberikan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan hak penggunaan kendaraan dinas bagi pelaku yang terbukti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau melanggar prosedur yang ada.
 - b. Mekanisme Pengawasan yang Lebih Ketat: Pengawasan internal terhadap penggunaan kendaraan dinas perlu diperketat. Diperlukan sistem pelaporan yang transparan mengenai penggunaan kendaraan dinas dan keharusan bagi pengguna untuk melaporkan kegiatan dinas mereka secara periodik. Universitas Jambi dapat memperkenalkan aplikasi atau sistem berbasis digital

yang memungkinkan para pengelola kendaraan dinas untuk memantau penggunaan kendaraan secara lebih real-time.

- c. Sosialisasi yang Lebih Intensif: Untuk mengurangi penyalahgunaan, perlu ada sosialisasi yang lebih luas tentang peraturan terkait penggunaan kendaraan dinas. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau materi yang diteruskan ke seluruh pegawai dan tenaga kontrak di lingkungan universitas. Ini penting agar setiap individu memahami dengan jelas batasan-batasan yang ada dan konsekuensi hukum yang dapat diterima jika melanggar aturan.
- d. Integrasi dengan Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara: Peraturan terkait kendaraan dinas harus diintegrasikan lebih dalam dengan sistem pengelolaan Barang Milik Negara yang ada. Universitas Jambi harus memanfaatkan sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan dan pencatatan penggunaan kendaraan dinas secara lebih terstruktur dan akuntabel.
- e. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri
Selain perbaikan internal, pemerintah juga perlu memperkuat aturan terkait kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri. Salah satunya adalah memperbarui peraturan tentang penggunaan Barang Milik Negara agar lebih spesifik mengatur penggunaan kendaraan dinas dan sanksi yang sesuai. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada dan memberi petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk diimplementasikan di tingkat universitas.

2. Saran Perbaikan Kekuatan Hukum Sanksi

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kekuatan hukum sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri, khususnya di Universitas Jambi, antara lain:

- a. Penegakan Sanksi yang Tegas: Terapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari administratif hingga pidana untuk kasus serius, tanpa pandang bulu.
- b. Perbaikan Proses Penjatuhan Sanksi: Buat pedoman rinci dan transparan mengenai jenis pelanggaran dan prosedur sanksi, memastikan proses yang objektif dan adil.
- c. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan: Gunakan teknologi, seperti aplikasi pelaporan otomatis, untuk memantau penggunaan kendaraan dinas secara transparan dan akuntabel.
- d. Pelatihan bagi Pegawai dan Tenaga Kontrak: Adakan pelatihan atau workshop tentang aturan penggunaan kendaraan dinas, termasuk aspek hukum dan etika, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
- e. Sosialisasi Konsekuensi Hukum: Tingkatkan kesadaran mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan kendaraan dinas melalui sosialisasi intensif di lingkungan universitas.
- f. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: Untuk pelanggaran serius, seperti pencurian atau kerugian besar, koordinasikan dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses hukum yang sesuai.

- g. Rekomendasi untuk Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri: Pemerintah perlu memperketat peraturan dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas di perguruan tinggi negeri, serta menyediakan pelatihan pengelolaan aset negara dan penerapan sanksi untuk implementasi yang efektif dan adil.